



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1672/DJU/KP5.8/IX/2025 Jakarta, 23 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Apresiasi atas Keberhasilan Lolos Seleksi ARUNIKA Volume II
Tahun 2025

Yth.

Bpk/Ibu Hakim Pengadilan Tinggi

Dan Hakim Pengadilan Negeri

di-

Tempat.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menulis Artikel Hukum Hakim Nusantara (ARUNIKA) Volume II Tahun 2025 dengan tema **“Implikasi KUHP Nasional terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dan Dikhususkan Pada Buku I.”** Prestasi ini merupakan cerminan dedikasi, kerja keras, dan kompetensi Bapak/Ibu dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan menginspirasi rekan-rekan lainnya. Berikut daftar Nama Penulis yang Lolos Seleksi ARUNIKA Volume II Tahun 2025:

No	Nama	Satuan Kerja	Judul
1	A Aulia Rahman	PN Maros	Pidana Kerja Sosial: Peluang dan Tantangan
2	Adji Prakoso	PN Sampang	Menelisik Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembayaran Ganti Rugi di KUHP Baru
3	Adrian Kristyanto Adi	PN Sampit	Implikasi Perluasan Yurisdiksi (Pasal 4 Huruf C KUHP Nasional) Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

4	Ahmad Wiranto	PN Sinjai	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Intelektual Pasca Berlakunya KUHP Nasional
5	Andi Ramdhan Adi Saputra	PN Magetan	Peran Hakim Menegakkan Keadilan dalam Perspektif Pasal 53 dan 54 KUHP
6	Arif Rachman Nur	PN Barru	Menyelisik Tidak Mampu Bertanggungjawab dan Kurang Mampu Bertanggungjawab dalam KUHP Baru
7	Arizal Anwar	PN Kalianda	Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan KUHPidana Nasional
8	Bagus Mizan Albab	PN Blangpidie	Selayang Pandang Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru Dikaitkan dengan Teori Tujuan Hukum
9	Bayu Akbar Wicaksono	PN Parepare	Penyikapan Hakim Terhadap Konsep Monoistis atau Dualistis KUHP Nasional
10	Cakra Budi Prasetyo	PN Muara Bulian	Menimbang Rasa Keadilan dan Kemanusiaan: Implikasi Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional Terhadap Sistem Peradilan Pidana
11	Catur Alfath Satriya	PN Kuningan	Implikasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terhadap Putusan Hakim
12	Christa Yulianta Prabandana	PN Sukadana	Reformulasi Pedoman Pemidanaan pada Ancaman Pidana Penjara Tunggal: Mewujudkan Fleksibilitas





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

			Pemidanaan Berkeadilan Restoratif
13	Christopher E. G. Hutapea	PN Tanjung Jabung Timur	KUHP Nasional: Pedoman Pemidanaan - Sarana bagi Hakim untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan
14	Denny Budi Kusuma	PN Muara Teweh	Analisis Penerapan KUHP Nasional sebagai Solusi Kelebihan Kapasitas Lapas dan Disparitas Pemidanaan
15	Dharma Setiawan Negara	PN Paringin	Pembaruan Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional
16	Didik Nursetiawan	PN Gunung Sugih	Era Baru KUHP Nasional: Perubahan Paradigma Pemidanaan Menyongsong Putusan Hakim yang Berkeadilan
17	Dismas Lukito Ornasto	PN Lembata	Pemidanaan yang Adil bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental
18	Dwi Bintang Satrio	PN Menggala	Mewujudkan Keadilan melalui Penerapan Pasal 131 KUHP Nasional Terkait Penjatuhan Pidana pada Delik Tertinggal
19	Eka Aditya Darmawan	PN Kayuagung	Batasan dan Tata Cara Penyitaan Kekayaan atau Pendapatan Terpidana yang Tidak Memenuhi Putusan Pidana Denda
20	Fahmiron	PT Denpasar	Implikasi Konsepsi Pemaafan Hakim terkait Berlakunya KUHP Nasional dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

21	Firdaus Zainal	PN Janeponto	Penegasan Pengaturan Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut KUHP Baru
22	Fitrah Akbar Citrawan	PN Rangkasbitung	Menanti Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional
23	Gerry Geovant Supranata Kaban	PN Wamena	Implikasi Konsep <i>Rechterlijk Pardon</i> Terhadap Sistem Pidanaaan di Indonesia Pasca Pemberlakuan KUHP Nasional
24	Gillang Pamungkas	PN Singkawang	Konstruksi Baru Pidanaaan yang Adil dan Proporsional dalam KUHP Nasional
25	Hanif Ibrahim Mumtaz	PN Pariaman	Tantangan Transformasi Paradigma Hakim terhadap Penerapan Pidana Denda dalam KUHP Nasional pada Tindak Pidana Ringan
26	Harsa Khairu	PN Bengkayang	Saat Negara Bicara <i>Mental Health</i> : Analisis Yuridis Terhadap KUHP 2023
27	Hilman Maulana Yusuf	PN Banjar	Hakim Bukanlah Petugas Stempel Penghukuman
			Progresivitas Hukum Responsif dalam Penerapan Asas Legalitas Materiil
			Sistematisasi Ambang Batas Pidanaaan dalam KUHP Nasional
28	Indra Tua Hasangapon Harahap	PN Bangkinang	Penerapan Pasal 53 Ayat (2) KUHP Nasional Terhadap Penarikan Delik Aduan yang Melewati Batas Waktu





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

29	Irwan Munir	PN Tanjung Pinang	KUHP Nasional: Kepastian Hukum yang Didambakan
30	Ibrahim Munib	PN Ngabang	Peran Penting Pemerintah Daerah dalam Mengaktualisasikan Hukum Adat di KUHP Nasional
31	Jatmiko Pujo Raharjo	PN Bangkinang	Pidana Bersyarat Versus Pidana Pengawasan (Serupa Tapi Tak Sama)
32	Jerry Thomas	PN Kisaran	Pergeseran Paradigma Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Adil dan Berkeadilan dalam Bingkai Pidana Mati
33	Jessyca Fatmawaty Hutagalung	PN Sungai Penuh	Eksistensi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dari Perspektif Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi dalam KUHP Nasional
34	Juliani Fransiska	PN Sei Rampah	Dari Teks ke Konteks: Integrasi Living Law dalam Prosedur Beracara Mahkamah Agung
35	Kadek Dwi Krisna Ananda	PN Selong	Jurimetri Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda Berdasarkan KUHP Nasional
36	Marsinta Uly	PN Ende	Pemaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) dalam KUHP Nasional: Implikasi dan Tantangan dalam Sistem Peradilan Indonesia
37	M. Adli Hakim H	PN Teluk Kuantan	KUHP Nasional sebagai Mekanisme Pendingin Entropi Sosial: Fenomena Masyarakat dalam Perpektif Filsafat Hukum Kedua Termodinamika





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

38	Mohammad Khairul Muqorobin	PN Pulang Pisau	Implikasi Asas <i>Geen Straf Zonder Schuld</i> Terhadap Putusan Pengadilan Pasca Berlakunya KUHP Nasional
39	Muhammad Farizal	PN Putussibau	Korporasi Sebagai Pelaku: Telaah Kritis Pertanggungjawaban Pidana dalam Buku I KUHP Nasional
40	Muhammad Nurulloh Jarmoko	PN Trenggalek	Peran Hakim untuk Menumbuhkan Rasa Penyesalan dan Membebaskan Rasa Bersalah Terpidana dalam Tujuan Pemidanaan KUHP Nasional
41	Mula Warman Harahap	PN Takengon	<i>Happy Ending Verdict</i> Pidana: Solusi Penerapan <i>Judicial Pardon</i> KUHP Nasional dalam Mengurangi <i>Cognitive Dissonance</i>
42	Natanael	PN Pacitan	Ketika Vonis Dipertanyakan: Pedoman Pemidanaan Sebagai Upaya Mewujudkan Keterjelasan Putusan Hakim
43	Novritsar Hasintongan Pakpahan	PN Kotabumi	Akomodasi Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk Mendukung Restorative Justice
44	Radityo Muhammad Harseno	PN Metro	Pembaruan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional: Peran Strategis Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif
45	Rohmat	PN Tais	Pidana Pengawasan: Mencapai Keadilan Rehabilitatif Melalui Pemidanaan Non-Pemenjaraan?





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

46	Romi Hardhika	PN Parepare	Menggugat Larangan Analogi dalam KUHP Nasional
47	Wienda Kresnantyo	PN Bangkalan	Pemidanaan <i>Blasphemy Law</i> Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
48	Yuzak Eliezer Setiawan	PN Parepare	Nilai Sebuah Pengakuan Bersalah Terdakwa dan Pedoman Pemidanaan yang Terukur: Mengubah Fakta Menjadi Angka

* Disusun berdasarkan abjad.

Demikian hal-hal yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
2. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang;
4. Ketua Pengadilan Negeri Banjar;
5. Ketua Pengadilan Negeri Barru;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang;
7. Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie;
8. Ketua Pengadilan Negeri Ende;
9. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
10. Ketua Pengadilan Negeri Janeponto;
11. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda;
12. Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung;
13. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran;
14. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi;
15. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan;
16. Ketua Pengadilan Negeri Lembata;
17. Ketua Pengadilan Negeri Magetan;
18. Ketua Pengadilan Negeri Maros;
19. Ketua Pengadilan Negeri Menggala;
20. Ketua Pengadilan Negeri Metro;
21. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian;
22. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh;
23. Ketua Pengadilan Negeri Ngabang;





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

24. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan;
25. Ketua Pengadilan Negeri Parepare;
26. Ketua Pengadilan Negeri Pariaman;
27. Ketua Pengadilan Negeri Paringin;
28. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
29. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau;
30. Ketua Pengadilan Negeri Sampang;
31. Ketua Pengadilan Negeri Sampit;
32. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah;
33. Ketua Pengadilan Negeri Selong;
34. Ketua Pengadilan Negeri Singkawang;
35. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai;
36. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana;
37. Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
38. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
39. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau;
40. Ketua Pengadilan Negeri Tais;
41. Ketua Pengadilan Negeri Takengon;
42. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
43. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
44. Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
45. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek;
46. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
47. Ketua Pengadilan Negeri Wamena.

